



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271

Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIPI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan *valid*.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Bagansiapiapi, 24 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Rokan Hilir.



H.ROY AZLAN, AP.,M.Si

NIP.19750413 199503 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan (*input oriented*), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut pada upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) atau keluaran (*output*) dari perencanaan alokasi biaya atau masukan (*input*) yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama Tahun Anggaran 2024 kepada Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam laporan ini disajikan pula

pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun pertama dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2021 – 2026. Ada pun pernyataan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

**Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Menuju Clean And Good Governance**

Tujuan tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 2 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2024, untuk 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan keterlambatan pengesahan APBD, Rasionalisasi Anggaran, dan belum sinkronnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan/pemeriksa lainnya.

Diharapkan LKjIP ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

langkah- langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan- kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.

Bagansiapiapi, 10 Januari 2025



INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugrahkan berkah rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wadah bagi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah digariskan serta kebijaksanaan operasional dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang perencanaan kinerja dan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran serta analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai media pertanggungjawaban tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026, LKjIP Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LKjIP ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 10 Januari 2025

INSPEKTUR,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

DAFTAR ISI

	HAL
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
E. Susunan Organisasi.....	7
F. Kondisi Strategis.....	9
G. Issu Strategis.....	14
H. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis (Renstra).....	18
1. Pernyataan Visi Misi.....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	20
3. Program Pencapaian Sasaran.....	21
4. Indikator Kinerja Utama.....	24
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
B. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	28
1. Program dan Kegiatan.....	28
2. Alokasi Anggaran.....	30

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
	A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	32
	B. Evaluasi dan Analisi Akuntabilitas Kinerja.....	34
	C. Capaian Kinerja Lainnya.....	74
	D. Realisasi Anggaran.....	75
	E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional.....	78
BAB IV	PENUTUP.....	79

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.....	5
Tabel 1.2 Data PNS berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 1.3 Data PNS berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 1.4 Data PNS berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 1.5 Data PNS berdasarkan Gender.....	13
Tabel 1.6 Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	15
Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.2 Pemetaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	21
Tabel 2.3 Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	28
Tabel 2.8 Target Output, Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	30
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	31
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.....	34
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.....	35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	35

Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis.....	36
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	38
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	39
Tabel 3.8	Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	43
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Level Kapabilitas APIP Yang Ditindaklanjuti Dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	45
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.....	46
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis.....	47
Tabel 3.13	Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024	49
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2024 di bandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	51
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2024 di bandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya	53

Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Penyelesaian TLHP-BPK RI Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	54
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.....	55
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	56
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis	56
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Predikat Nilai Minimal BB Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya	58
Tabel 3.22	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024	58
Tabel 3.23	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	60
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	61
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya	63
Tabel 3.26	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Nilai AKIP OPD dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	64
Tabel 3.28	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2024.....	68
Tabel 3.29	Realisasi Program Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023	71

Tabel 3.30	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024	71
Tabel 3.31	Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

HAL

8

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 1.1 Data PNS berdasarkan Jabatan.....	10
Grafik 1.2 Data PNS berdasarkan Golongan.....	11
Grafik 1.3 Data PNS berdasarkan Pendidikan.....	12
Grafik 1.4 Data PNS berdasarkan Gender.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yang merupakan kinerja tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Tahun 2024;
3. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Gambaran Umum

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir termasuk kedalam Misi ke 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi”** maka Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4				5
1	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	70%	75%	80%	85%
4	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	50%	55%	60%	65%	70%
5	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat BB	55%	80%	85%	90%	100%
6	Nilai AKIP OPD	BB	BB	A	A	A

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan
 - a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

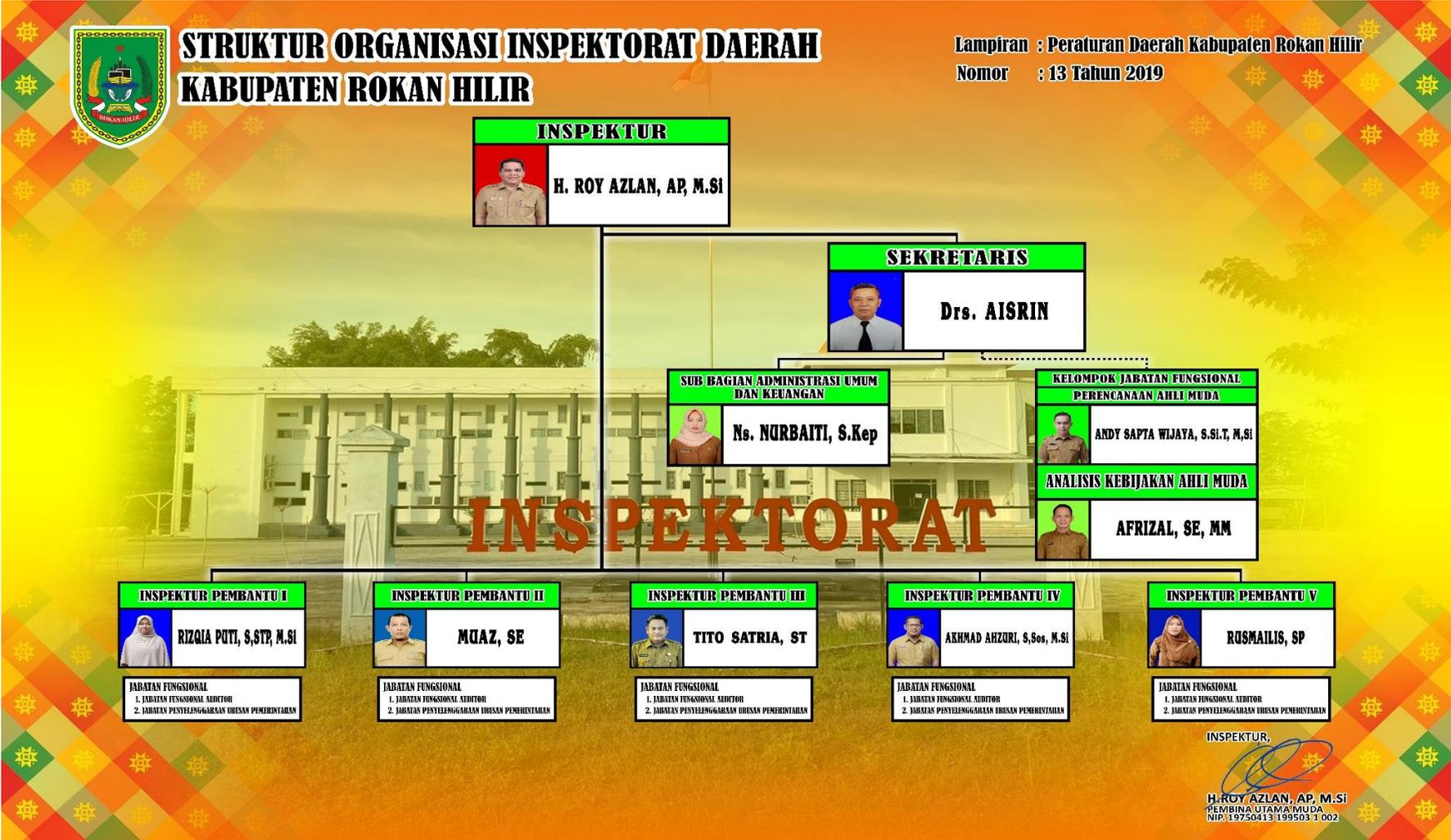
1. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

1. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas dan Fungsional Tertentu Lainnya
2. Sekretariat terdiri dari atas :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektorat Pembantu terdiri atas :
 - a. Inspektorat Pembantu I;
 - b. Inspektorat Pembantu II;
 - c. Inspektorat Pembantu III;
 - d. Inspektorat Pembantu IV; dan
 - e. Inspektorat Pembantu V
4. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian;
5. Inspektorat Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



F. Kondisi Strategis

1. Eksternal

Dalam rangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel maka perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) beberapa hal yang harus di perhatikan yakni adanya perubahan peraturan yang mengharuskan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan kegiatan seperti reviu DAK. Dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terhadap pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas perjanjian/kontrak/perikatan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran. Selain itu Dalam upaya menindaklanjuti tuntutan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat sebagai unsur pengawasan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APD) dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Sapu Bersih (SABER PUNGLI) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengendalian pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memandatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dan Korsupgah serta Pengendalian Gratifikasi. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Internal

a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

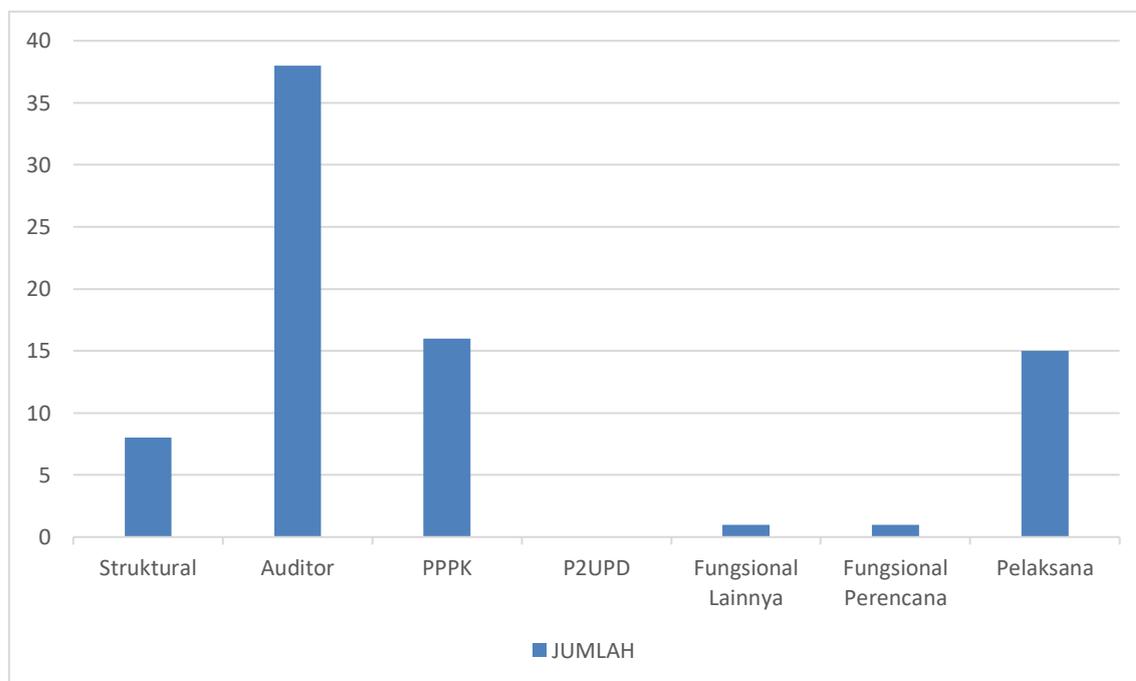
Perkembangan Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL						JUMLAH
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	KHUSUS				UMUM		
			Auditor	P2UPD	PPPK	Fungsional Lainnya	Fungsional Perencana	Pelaksana	
1	6	1	38	0	16	1	1	15	79

Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.1
Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan

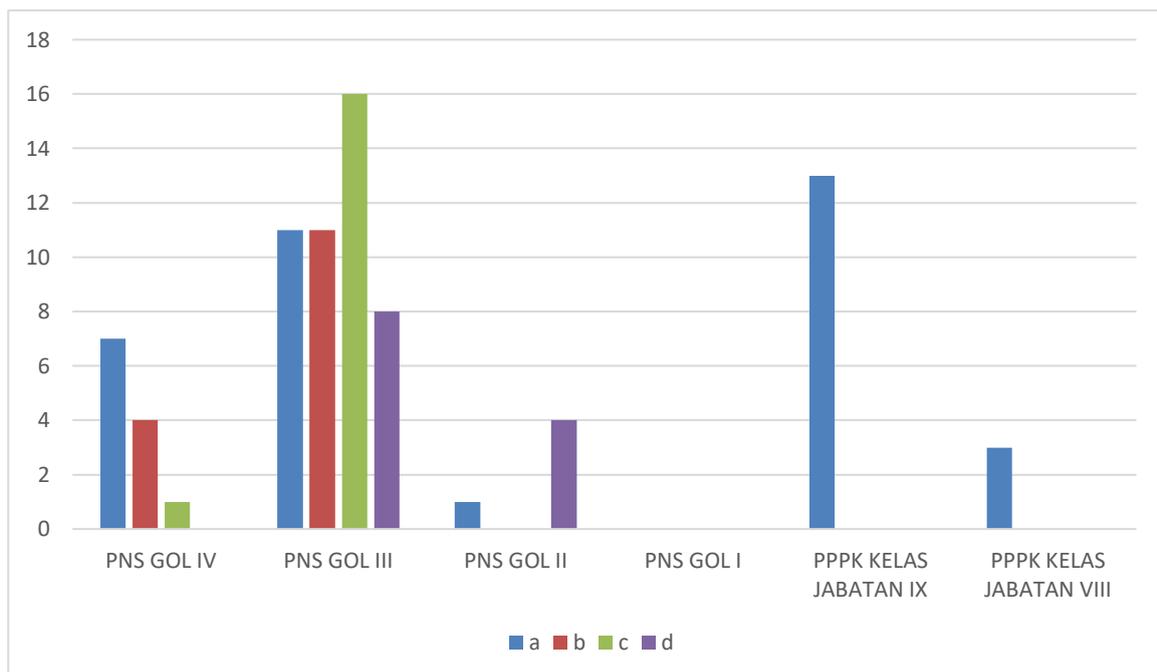


Tabel 1.3
Data ASN berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN/PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	PNS GOL IV	7	4	1	0	12
2	PNS GOL III	11	11	16	8	46
3	PNS GOL II	1	0	0	4	5
4	PNS GOL I	0	0	0	0	0
5	PPPK KELAS JABATAN IX					13
6	PPPK KELAS JABATAN VIII					3
JUMLAH						79

Sumber Data: Subbagian Admintrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.2
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan

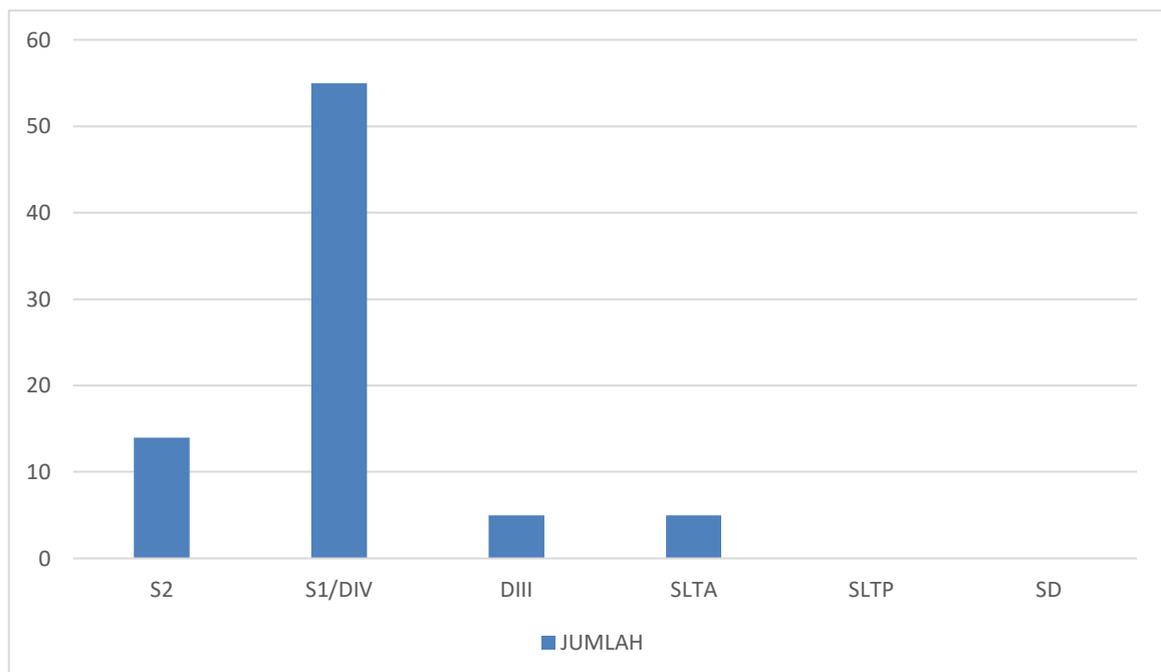


Tabel 1.4
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	14
2	Sarjana S1/D-IV	55
3	Diploma/D-III	5
4	SLTA (Sederajat)	5
5	SLTP (Sederajat)	0
6	SD (Sederajat)	0
JUMLAH		79

Sumber Data: Subbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.3
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

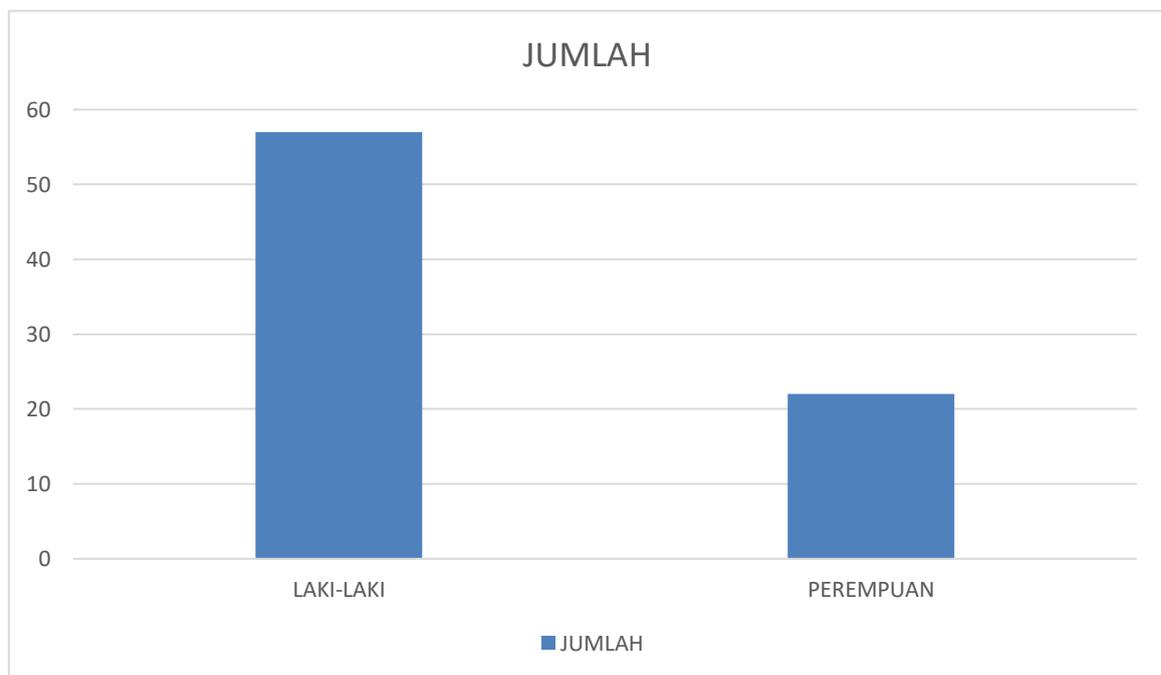


Tabel 1.5
Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Gender

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	57
2.	PEREMPUAN	22
JUMLAH		79

Sumber Data: Subbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.4
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Gender



G. Isu Strategis

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan permasalahan perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, fokus Pembinaan dan pengawasan adalah:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pemeriksaan yang bersifat mandatory;
4. Pengawasan reformasi birokrasi;
5. Penegakan integritas;
6. Asistensi/pendampingan;
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Dan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan maka tidak hanya perlu dukungan anggaran yang besar namun perlu perencanaan pengawasan yang matang agar tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat dicapai secara optimal.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih rendahnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawas
		Belum optimalnya Pengembangan SDM Pengawasan	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
		Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah	Keterbatasan pelatihan dan pendidikan substantif kepada SDM dibidang pengawasan
		Tingkat korupsi masih cukup tinggi	Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Belum tercapainya focus stranas PK dan MCP Korsupgah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
		Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari pemetaan permasalahan diatas dapat di analisa isu-isu strategis utama (strategic issued) yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada saat ini adalah :

1. Belum optimalnya implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Belum adanya perangkat daerah mendapatkan predikat WBK/WBBM.
3. Belum tercapainya secara optimal stranas PK.
4. Belum optimalnya pengembangan SDM APiP.

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- Bab I : Pendahuluan Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, dan kondisi strategis yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bab II : Perencanaan Kinerja Pada bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bab III : Akuntabilitas kinerja Tahun 2024, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2024, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi Anggaran Tahun 2024, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Inspektorat Daerah melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di tetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2024. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun guna mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh program kegiatan. Gambaran dan pemahaman atas langkah-langkah kegiatan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan Visi Bupati Rokan Hilir terpilih periode 2021-2026 adalah: **“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian Yang Handal”**. Visi Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 memiliki makna maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih.

Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Antar Wilayah Untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) Yang Terencana dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi.

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita masyarakat Riau yang akan dicapai dalam kurung waktu 2019-2024.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. **Tujuan strategis** adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya tujuan maka Inspektorat Daerah dapat secara tepat melakukan kegiatan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, yang tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) APIP dan penganggaran.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Daerah sesuai dengan rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Tujuan Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	1. Meningkatnya profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP 2. Meningkatnya kinerja pengawasan daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

b. **Sasaran Strategis** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Daerah. Perumusan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pemetaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	1. Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti 2. Level Kapabilitas APIP
		2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB 2. Predikat AKIP OPD

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran strategis merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Untuk itu setiap tujuan dan sasaran dilengkapi indikator kinerja yang terukur.

3. Program Pencapaian Sasaran

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan Program-program yang ada di Inspektorat dalam upaya mencapai tujuan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.3
Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMDUKUNG
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	1. Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan 2. Level Kapabilitas APIP	1. Penyelenggaraan Pengawasan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	1. Penyelenggaraan Pengawasan
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori BB 2. Predikat AKIP OPD	1. Penyelenggaraan Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi melalui program sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Meningkatkan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan melalui kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

- c. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan tertentu
 3. Pelaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 4. Pelaksanakan Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%
			Level / Skor Kapabilitas APIP	Level 3/3,0	Level 3/3,0	Level 3/3,0	Level 3/3,0	Level 3/3,0
		Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	70%	75%	80%	85%
			Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	50%	55%	60%	65%	70%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	55%	80%	85%	90%	100%
			Predikat AKIP OPD	BB/70,01	BB/70,01	A/80,01	A/80,01	A/80,01

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya. Penetapan IKU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan berpedoman pada RPJMD.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	3	4			
1.	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Persen (%)	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dibagi Jumlah Seluruh Aparat Pengawas X 100%	Data Laporan Realisasi Diklat Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
		Level / Skor Kapabilitas APIP	Level/Skor	Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau
	2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah X 100%	Data Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI X 100%	Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	Persen (%)	Jumlah OPD dengan kategori hasil evaluasi SAKIP minimal BB dibagi Jumlah seluruh OPD yang dievaluasi X 100%	Data laporan dari hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat
		Predikat AKIP OPD	Kategori/Nilai	HASIL evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Data laporan dari hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang ada didalam perjanjian kinerja mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- ✚ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✚ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✚ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✚ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- ✚ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 yang berisi 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2024. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.

Rincian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Persen (%)	91%
		Level/Skor Kapabilitas APIP	Level 3 / Skor (3,0)	Level 3 / Skor (3,1)
	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	71%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	81,50%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	Persen (%)	91%
		Predikat AKIP OPD	Kategori/Nilai	A / 80,01

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Untuk mewujudkan kinerja yang telah di perjanjikan pada tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.934.187.543,39	APBD-P
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.868.805.886	APBD-P
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.116.452.781,61	APBD-P
Total Belanja langsung		28.919.446.211	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahun anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan 3 program dengan rincian sebagai berikut : untuk belanja operasi sebesar Rp20.350.784.527 dan belanja Modal sebesar Rp3.635.789.596, setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2023 anggaran Inspektorat Daerah mengalami perubahan sebesar: Belanja operasi Rp24.564.131.502 dan Belanja modal Rp4.355.314.709 hal ini adanya peningkatan sebesar 20,57%. anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai urusan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2024 memiliki 2 Program dan Kegiatan yang meliputi:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Reviu Laporan Kinerja

3. Reviu Laporan Keuangan
4. Kerjasama Pengawasan Internal
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

B. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

II. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

A. KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

B. KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tabel 2.8
Target Output, Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
	A KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL			
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	300
2	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30
3	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1
4	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal Yang Terbentuk	Kesepakatan	1
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	48
	B KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
	A KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Yang Disusun	Rekomendasi	1
	B KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	30
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	30
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	4

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan rencana keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Anggaran pengeluaran terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

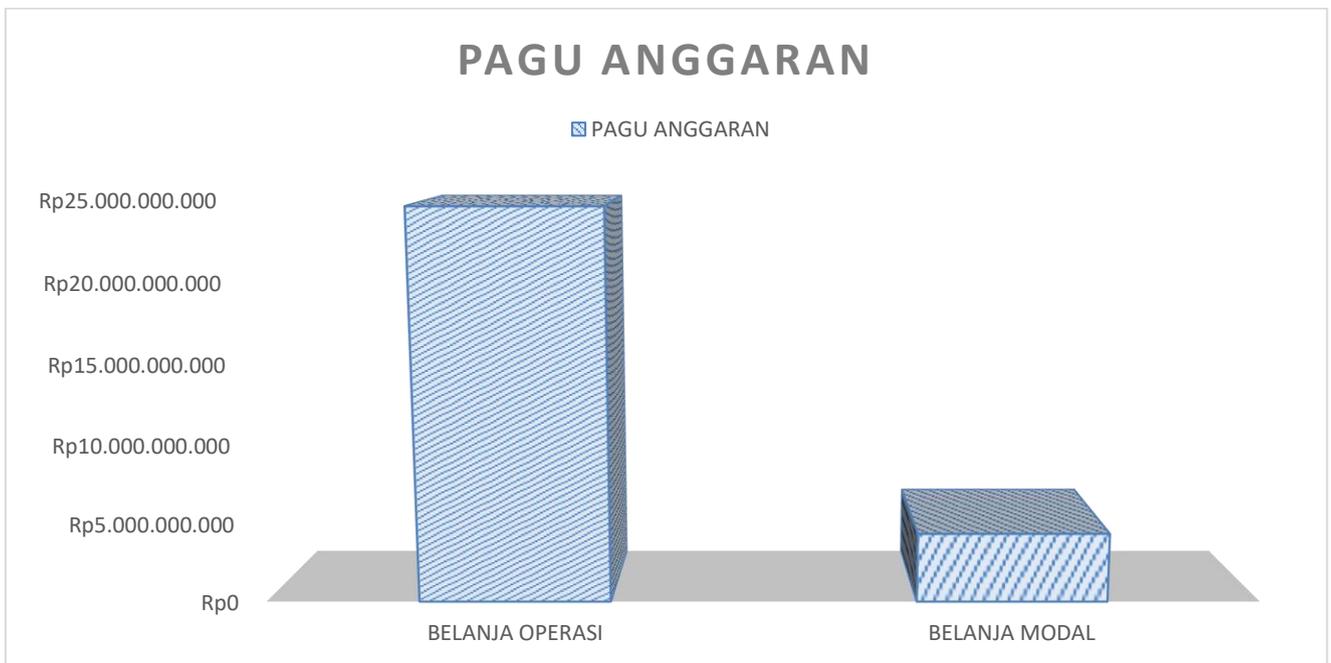
Belanja Operasi adalah belanja yang mendukung capaian tujuan organisasi dan Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai (gaji pegawai). Belanja ini tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

NO.	URAIAN	PAGU	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1.	Belanja Operasi	24.564.131.502	84,94
2.	Belanja Modal	4.355.314.709	15,06
Total		28.919.446.211	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 2.1
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 3 (tiga) tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 s.d 99%	Baik
3.	55% s.d 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja dengan akhir tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	91%	93,02%	100%
		Level / Skor Kapabilitas APIP	Level 3/ Skor 3,1	Level 3 / Skor 3,260	100%
	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	71%	71,11%	100%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	81,50%	76,85%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	91%	90%	98,90%
		Predikat AKIP OPD	Kategori A / Nilai 80,01	Kategori BB / Nilai 79,95	99,92%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	91%	93,02%	100%
		Level / Skor Kapabilitas APIP	Level 3 / Skor 3,1	Level 3 / Skor 3,260	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	100%	100%	100%
		Level / Skor Kapabilitas APIP	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2024 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	95%	93,02%	97,92%
		Level / Skor Kapabilitas APIP	Level 3 / 3,0	Level 3 / 3,260	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 1 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan Internal, dan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP; serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan sub kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan** dari data yang diterima sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 93,02% dari 91% target yang ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori baik sekali disebabkan karena persentase capaian sebesar 100%.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan}}{\text{Jumlah Seluruh Aparat Pengawas}} \times 100\%$
--

Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil dari Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir per 31 Desember 2024, jumlah aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 43 orang yang terdiri dari 5 orang Inspektur Pembantu, 5 Orang Auditor Madya, 13 orang Auditor Muda, 19 Auditor Pertama dan 1 orang Auditor Pelaksana Lanjutan.

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	75%	76%	100%	80%	90,24%	100%	91%	93,02%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 6

Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya



Berdasarkan tabel diatas capaian persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis pengawasan pada tahun 2022 realisasi yang dicapai 76% dari target 75%, pada tahun 2023 realisasi yang dicapai sebesar 90,24% dari Target 80% yang ditetapkan. Jika di lihat dari 2 tahun terakhir (Tahun 2022 dan Tahun 2023) capaian jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis pengawasan telah memenuhi target yang diharapkan, sementara capaian di Tahun 2024 sebesar 93,02% melebihi dari target capaian tahun-tahun sebelumnya sebesar 75% di Tahun 2022 dan 90,24% di Tahun 2023.

Adapun faktor pendorong meningkatnya indikator kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan adalah:

- a. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan anggaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Keinginan kuat dari aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan profesionalismenya;
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Capaian Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	91%	93,02%	100%	95%	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Bila dilihat dari tabel diatas maka Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dengan target Renstra Tahun 2024 sebesar 91%, realisasinya sebesar 93,02%. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 95% jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dengan akhir Renstra Inspektorat sudah memenuhi target yang ditetapkan.

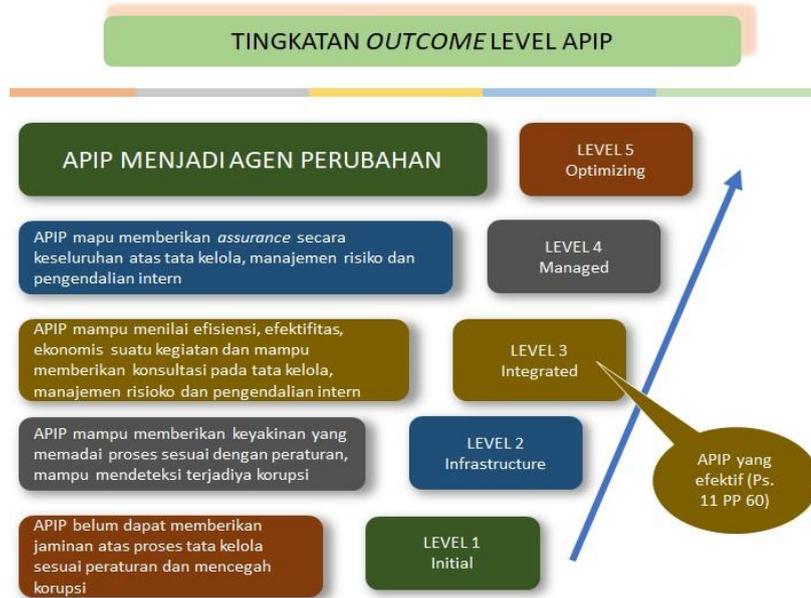
- 2. Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP**, untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah berada pada level 3 (Integrated) di akhir tahun 2024. Capaian ini termasuk dalam kategori baik sekali karena persentase capaian sebesar 100%.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator capaian kinerja level kapabilitas APIP Level 3 adalah sebagai berikut :

**TINGKAT LEVEL KAPABILITAS APIP YANG HENDAK DICAPAI INSPEKTORAT
YANG DI EVALUASI OLEH BPKP PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Tingkatan capaian level kapabilitas APIP yang di Evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dapat digambarkan ada tabel dibawah ini:

Gambar Level Kabilitas APIP



Untuk mencapai level 3, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan antara lain:

- 1). Melakukan Self Assessment untuk 6 elemen pada bulan Juni 2023
- 2). Tim dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- 3). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menerbitkan Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah memenuhi semua dokumen daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yaitu : 1. Peran dan layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Manajemen Kinerja, 5. Hubungan dan Koordinasi 6. Struktur Tata Kelola.

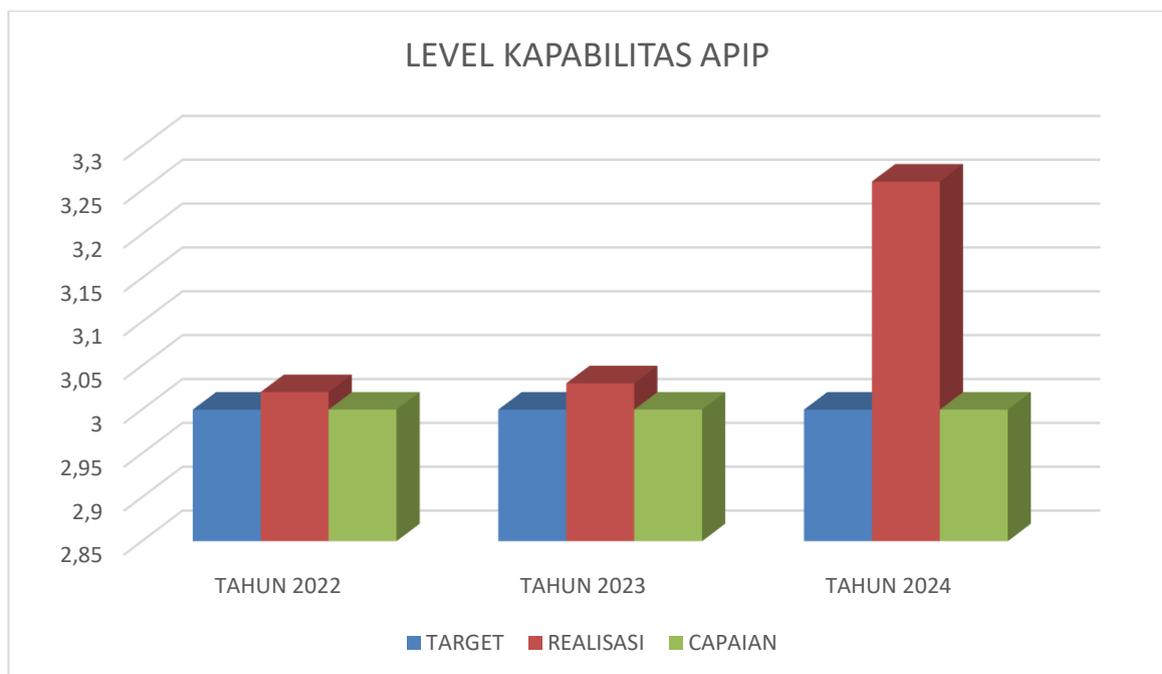
Sesuai dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Nomor : PE.09.03/LHP-249/PW04/6/2024, Tanggal 29 juli 2024, Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada "Level 3" dengan Skor **3,030** sebagaimana uraian berikut:

NO.	ELEMEN	LEVEL	SKOR
Komponen Dukungan Pengawasan (enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0.540
2.	Praktik Profesional	3	0.540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0.240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0.180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0.360
Komponen Aktivitas Pengawasan (delivery) dan Kualitas Pengawasan (result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,400
SIMPULAN ENTITAS		3	3.260

Tabel 3.8
Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2024 dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator kinerja utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3/Skor 3,0	Level 3/Skor 3,02	100%	Level 3/ Skor 3,0	Level 3/Skor 3,03	100%	Level 3 / Skor 3,1	Level 3 / Skor 3,260	100%

Grafik 7
Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2024 dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Berdasarkan table di atas, capaian Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, telah mencapai Target Level 3 berdasarkan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Upaya-upaya dilakukan Inspektorat Daerah dalam mempertahankan Kapabilitas APIP Level 3 ini adalah telah menindaklanjuti rencana aksi Kapabilitas APIP yaitu:

1. Membuat formulasi IPMS pada audit kinerja yang telah dilakukan.
2. Perbaiki Audit Kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
3. Pendampingan perbaikan audit kinerja berbasis risiko.
4. Pelatihan terkait manajemen risiko dan PPBR.
5. Melaksanakan kegiatan reviu secara berkala/ tahunan terkait proses penyusunan PPBR untuk periode 5 tahun dan menyusun kertas kerja sebagai bentuk monitoring penyusunan PPBR.
6. Perbaiki register risiko perangkat daerah dengan melakukan pendampingan pemutakhiran peta resiko dan penilaian kematangan manajemen risiko perangkat daerah.
7. Melaksanakan monitoring tindaklanjut dan analisa terhadap LKJIP Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Dengan tercapainya Kapabilitas APIP level 3 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dinilai sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Dengan upaya tersebut diatas diharapkan Inspektorat Daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Level Kapabilitas APIP
Yang Ditindaklanjuti Dengan Target Jangka Menengah Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Level/Skor Kapabilitas APIP	Level 3/Skor 3,1	Level 3/Skor 3,260	100%	Level 3/Skor 3,0	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Bila dilihat dari tabel diatas maka Level Kapabilitas APIP dengan target hasil Evaluasi Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau yaitu Kapabilitas APIP Level 3, di dapatkan realisasi hasil evaluasi yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih berada pada Level 3 untuk Kapabilitas APIP nya.

Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kapabilitas APIP Level 3 jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, maka capaian kinerja untuk indikator Level Kapabilitas APIP dengan akhir Renstra Inspektorat sudah memenuhi target yang ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	71%	71,11%	100%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	81,50%	76,85%	94,29%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	100%	94,28%
Rata-rata capaian			100%	100%	97,14%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.12
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 Dibandingkan
 s.d. Akhir Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP CAPAIAN AKHIR RENSTRA (%)
1		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	85%	71,11%	83,66%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	70%	76,84%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 2 dalam 2 tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui Program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan Internal, dan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP; serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan sub kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti**, per 31 Desember 2024 adalah sebesar 71,11%, dari target yang ditetapkan sebesar 71% . Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik dikarenakan persentase capaian sebesar 100%. Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan antara lain : pemeriksaan regular, audit investigasi, Audit tujuan tertentu, revidu, evaluasi, monitoring, pendampingan dan pengawasan lainnya sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Selama tahun anggaran 2024, pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan pada 48 OPD yang terdiri dari 30 Dinas/Badan dan 18 Kecamatan serta 159 Desa.

Faktor Pendorong meningkatnya Persentase Rekomendasi APIP adalah:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan tindak lanjut APIP
- b. Keinginan kuat dari APIP Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani tindak lanjut hasil temuan APIP.

Rumus yang digunakan dalam mengukur indikator Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

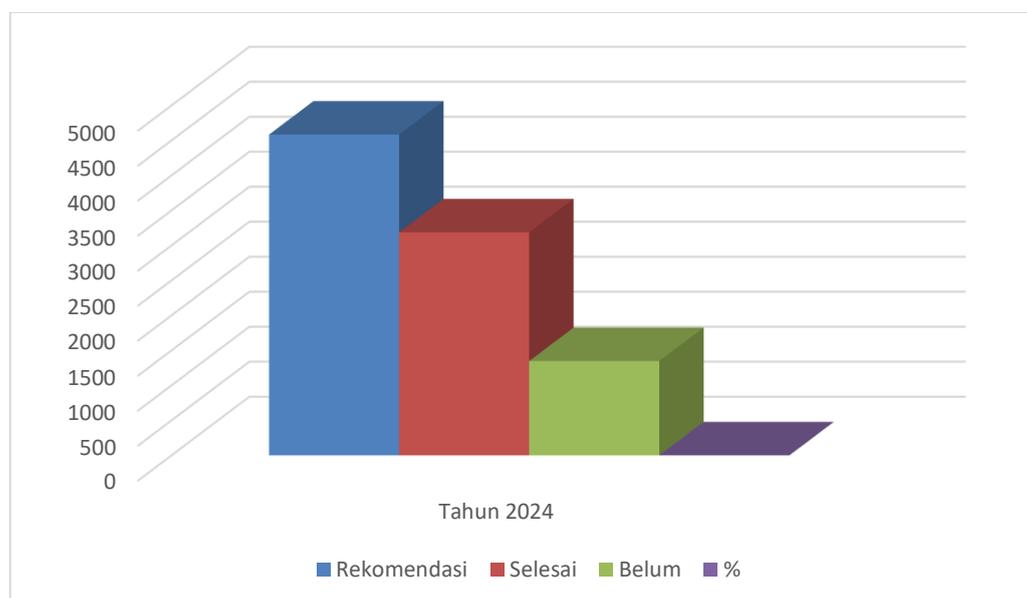
$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menggambarkan hasil capaian kinerja persentase penyelesaian TLHP-APIP dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024

No.	Tahun	Temuan/ Rekomendasi	Selesai	Belum	%
1	2024	4583	3259	1347	71,11

Grafik 8
Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024



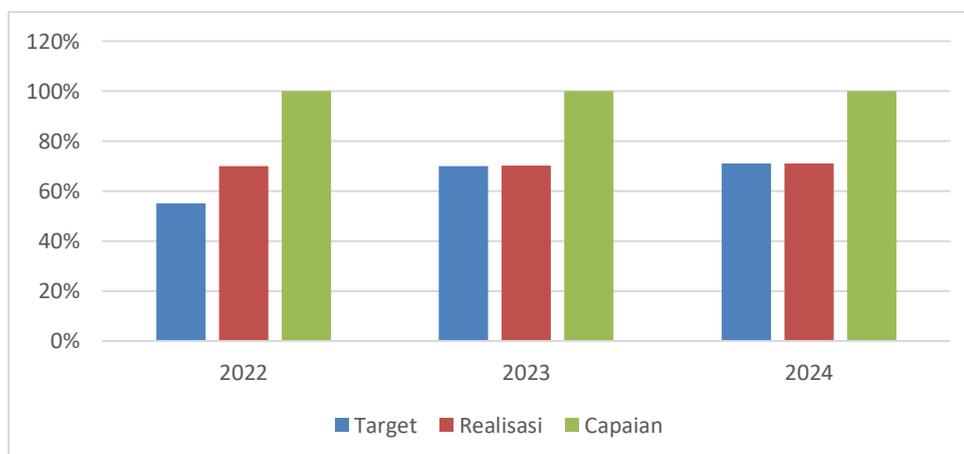
Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2024 di bandingkan dengan
Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	70%	100%	70%	70,28%	100%	71%	71,11%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2022 realisasi yang dicapai 70% dari target 55%, pada tahun 2022 realisasi yang dicapai sebesar 70,28% dari 70% Target yang ditentukan. Capaian tahun 2024 sebesar 71,11% sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71%. Bila dibandingkan dari tahun 2022 dan 2023, maka capaian tahun 2024 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 9
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2024 di bandingkan
Dengan Tahun-Tahun sebelumnya



Dari grafik di atas, jika di lihat dari 2 tahun (Tahun 2022 dan Tahun 2023) capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti telah memenuhi target yang diharapkan, dan untuk Tahun 2024 sudah mencapai target yang diharapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja (Outcome) Presentase penyelesaian TLHP-APIP sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen Renstra dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase rekomendasi APIP yang ditindak lanjuti	71%	71,11%	100%	85%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahun 2024 persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti dengan target renstra sebesar 71%, terealisasi sebesar 71,11%, dengan capaian target sebesar 100%. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 85%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti tahun 2024 terhadap target akhir Renstra Inspektorat sudah mencapai target yang ditetapkan.

Upaya-upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-APIP, sama halnya dengan persentase penyelesaian TLHP BPK, Inspektorat juga Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat) serta pro aktif dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan ke objek pemeriksaan.

2. **Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Yang Selesai Ditindaklanjuti**, per 31 Desember 2024 adalah sebesar 76,84% dari target yang ditetapkan sebesar 81,50%. Capaian ini termasuk dalam kategori BAIK, hal ini disebabkan karena persentase capaian sebesar 94,28%.

Faktor Pendorong meningkatnya Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-BPK di Tahun 2024 adalah:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan tindaklanjut BPK
- b. Keinginan kuat dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani tindak lanjut hasil temuan BPK.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Persentase Penyelesaian TLHP-BPK adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI}} \times 100\%$$

Untuk menggambarkan hasil capaian kinerja persentase penyelesaiannya TLHP-APIP dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindakan Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024

No.	Tahun	Temuan/ Rekomendasi	Selesai	Belum	%
1	2024	1183	909	274	76,84

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di bandingkan dengan
Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	50%	54%	100%	55%	81,33%	100%	81,50%	76,84%	94,28%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas menggambarkan jumlah seluruh rekomendasi atas kejadian temuan pengawasan, yang berasal dari PKPT awal maupun PKPT Perubahan atas kegiatan assurance yang di tindak lanjuti dalam tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah kejadian rekomendasi hasil pengawasan yang terbit di tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 realisasi yang dicapai 54% dari 50% target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi yang dicapai 81,33% dari 55% target yang ditentukan. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi yang dicapai tahun 2024 adalah sebesar 76,84% dari 81,50% target yang ditentukan, terjadi penurunan capaian target dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya kinerja APIP untuk melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI.

Grafik 10
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2024 di Bandingkan
Dengan Tahun-Tahun sebelumnya



Perbandingan realisasi kinerja (outcome) persentase penyelesaian TLHP-BPK-RI Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen Renstra dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Penyelesaian
TLHP-BPK RI Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	81,50%	76,84%	100%	70%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahun 2024 Persentase penyelesaian TLHP-BPK dengan target kinerja sebesar 81,50% dengan realisasinya sebesar 76,84%. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 70%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase penyelesaian TLHP-BPK dengan akhir Renstra Inspektorat telah tercapai.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-BPK adalah dengan:

1. Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat);
2. Melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan langsung keobjek pemeriksaan;
3. Melaksanakan pendampingan/fasilitasi atas tindaklanjut temuan BPK dengan cara pembahasan dan pemutakhiran tindaklanjut temuan BPK.

SASARAN STRATEGIS 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	91%	90%	98,90%
		Predikat AKIP Inspektorat	Kategori A / Nilai 80,01	Kategori BB / Nilai 79,95	99,92%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.19
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Inspektorat Daerah Kabupaten
 Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi
 Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	100%	100%	98,90%
		Predikat AKIP Inspektorat	100%	100%	99,92%
	Rata-rata capaian		100%	100%	99,41%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.20
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 Dibandingkan
 s.d. Akhir Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	100%	90%	90%
		Predikat AKIP Inspektorat	Kategori A / Nilai 80,03	Kategori BB / Nilai 79,95	99,90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 3 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui Program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Kerjasama Pengawasan Internal.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB, pada Tahun 2024 mencapai 90% dari target sebesar 91%. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Jumlah OPD yang berkategori Sangat Baik (BB) yaitu sebanyak 27 OPD sedangkan berkategori Baik (B) yaitu sebanyak 3 OPD dari jumlah 30 OPD yang dilakukan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan implementasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki tugas sebagai evaluator. Indikator yang menjadi penilaian SAKIP OPD adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal dan

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD Dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Dengan Predikat Nilai Minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh OPD Yang di Evaluasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD
Dengan Predikat Nilai Minimal BB Tahun 2024 di Bandingkan
Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase predikat hasil evaluasi SAKIP OPD dengan kategori minimal BB	70%	73,33%	100%	80%	90%	100%	91%	90%	98,90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB pada tahun 2024, realisasi yang dicapai yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 91%. Sementara pada tahun 2023 realisasi yang dicapai sebesar 90% dari 80% target yang ditentukan dan di tahun 2022 realisasi yang dicapai sebesar 73,33% dari 70% target yang ditentukan . Jika di lihat dari 2 tahun terakhir persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB telah mencapai target yang ditetapkan, namun di tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan, hal disebabkan karena terdapat beberapa OPD yang belum memahami dan mengimplementasikan SAKIP dengan baik.

Capaian Jumlah OPD SAKIP Tahun 2024 yang ber predikat BB tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.22
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Inspektorat Daerah	79,95	BB (Sangat Baik)
2.	Sekretariat Daerah	79,55	BB (Sangat Baik)
3.	Dinas Perikanan	78,95	BB (Sangat Baik)
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72,40	BB (Sangat Baik)
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90	BB (Sangat Baik)
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75,60	BB (Sangat Baik)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73,93	BB (Sangat Baik)
8.	Dinas Sosial	73,47	BB (Sangat Baik)
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	74,25	BB (Sangat Baik)
10.	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	73,60	BB (Sangat Baik)

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	75,30	BB (Sangat Baik)
12.	Badan Perencanaan dan Pembangunan	77,80	BB (Sangat Baik)
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,77	BB (Sangat Baik)
14.	Badan Pendapatan Daerah	75,50	BB (Sangat Baik)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A	72,10	BB (Sangat Baik)
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	72,25	BB (Sangat Baik)
17.	RSUD DR Pratomo	71,25	BB (Sangat Baik)
18.	Dinas Kesehatan	74,90	BB (Sangat Baik)
19.	Dinas Koperasi dan UMKM	72,50	BB (Sangat Baik)
20.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	71,60	BB (Sangat Baik)
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	73,05	BB (Sangat Baik)
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	73,50	BB (Sangat Baik)
23.	Sekretariat Dewan	72,45	BB (Sangat Baik)
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71,85	BB (Sangat Baik)
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	71,00	BB (Sangat Baik)
26.	Dinas Ketenaga Kerjaan	68,95	B (Baik)
27.	Dinas Lingkungan Hidup	71,35	BB (Sangat Baik)
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,40	BB (Sangat Baik)
29.	Dinas Perhubungan	70,00	B (Baik)
30.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	69,00	B (Baik)

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023

Dari tabel diatas maka dapat dilihat peningkatan nilai akuntabilitas Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan kategori BB ini diharapkan dapat dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan. Sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dibawah ini dapat digambarkan perkembangan hasil evaluasi SAKIP OPD di Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun 2022 s.d 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI		
		2022	2023	2024
1.	Inspektorat Daerah	78,47	80,00	79,95
2.	Sekretariat Daerah	74,85	78,15	79,55
3.	Dinas Perikanan	76,70	78,05	78,95
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,71	77,92	72,40
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,56	74,78	74,90
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72,69	74,19	75,60
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,40	73,93	73,93
8.	Dinas Sosial	70,29	73,47	73,47
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	72,45	73,35	74,25
10.	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	73,15	73,33	73,60
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	72,52	73,21	75,30
12.	Badan Perencanaan dan Pembangunan	72,06	73,00	77,80
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,22	72,71	74,77
14.	Badan Pendapatan Daerah	71,86	72,65	75,50
15.	Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A	71,16	71,85	72,10
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70,93	71,43	72,25
17.	RSUD DR Pratomo	70,79	71,38	71,25
18.	Dinas Kesehatan	70,62	71,02	74,90
19.	Dinas Koperasi dan UMKM	70,56	70,83	72,50
20.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70,56	70,80	71,60
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	70,41	70,80	73,05
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	58,20	70,61	73,50
23.	Sekretariat Dewan	70,06	70,40	72,45
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55,35	70,10	71,85
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	60,14	70,08	71,00
26.	Dinas Ketenaga Kerjaan	69,00	70,08	68,95

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI		
		2022	2023	2024
27.	Dinas Lingkungan Hidup	66,50	66,50	71,35
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,09	69,09	71,40
29.	Dinas Perhubungan	66,83	66,83	70,00
30.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	63,20	63,20	69,00

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	91%	90%	90%	100%	90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan target sebesar 91% ,realisasinya sebesar 90%. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, capaian kinerja untuk indikator Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan akhir Renstra Inspektorat belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh APiP selaku Evaluator AKIP Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk tercapainya Implementasi SAKIP OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah:

1. Melakukan Pendampingan SAKIP di seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Meningkatkan SDM tim evaluator SAKIP dengan mengikuti bimtek/diklat SAKIP yang diharapkan dapat melakukan evaluasi lebih fokus dan terarah serta dapat menghasilkan laporan evaluasi SAKIP yang optimal.
3. Berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan implementasi SAKIP OPD di Pemerintah Kabupaten Rokan Hili dengan melakukan rapat pembahasan dan pemutakhiran data SAKIP.

2. Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP OPD, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan nilai 79,95 dengan predikat BB atau Sangat Baik, belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu predikat A atau Memuaskan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Nilai AKIP Inspektorat adalah sebagai berikut:

HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT
--

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai AKIP Inspektorat Daerah
Tahun 2024 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Inspektorat	Kategori BB	Kategori BB	100%	Kategori BB	Kategori BB	100%	Kategori A / Nilai 80,01	Kategori BB / Nilai 79,95	99,92%

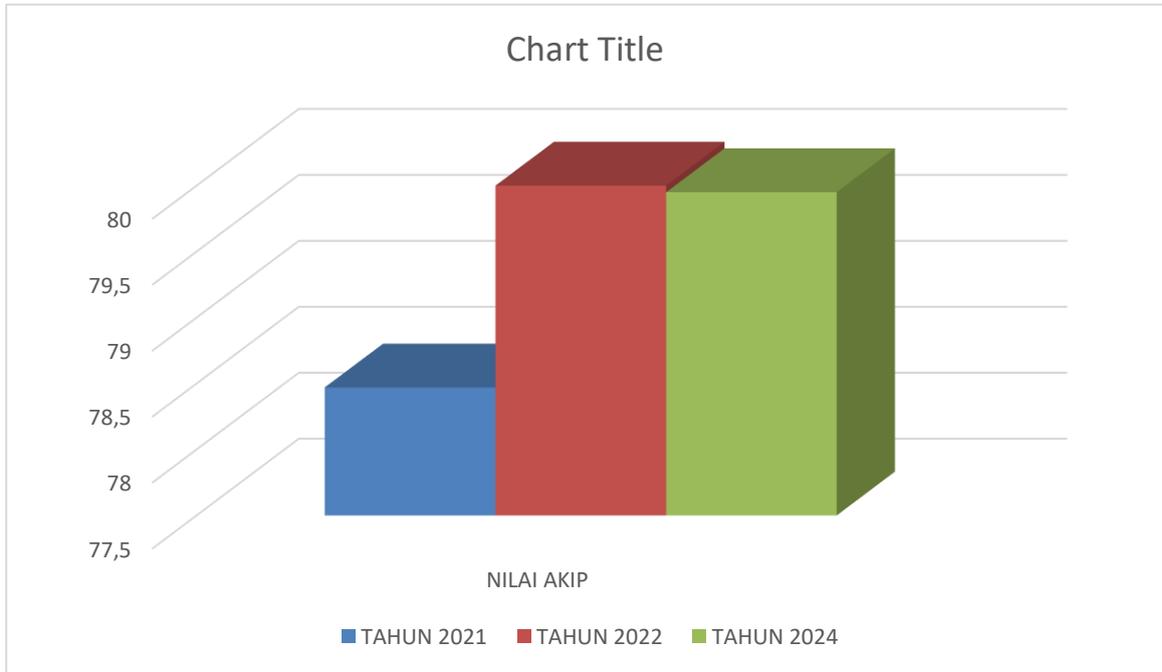
Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat, Predikat Nilai AKIP Inspektorat pada tahun 2024, realisasi yang dicapai yaitu Kategori BB/Nilai 79,95 dari target yang ditetapkan yaitu Kategori A/Nilai 80,01. Sementara pada tahun 2023 realisasi yang dicapai yaitu Kategori BB dari target yang ditetapkan yaitu Kategori BB dan di tahun 2022 realisasi yang dicapai yaitu Kategori BB dari target yang ditetapkan yaitu Kategori BB. Jika di lihat dari 2 tahun terakhir persentase kategori Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan, namun di Tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan terdapat beberapa kategori yang belum terpenuhi dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.26
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2024
di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI/KATEGORI		
		2022	2023	2024
1.	Inspektorat Daerah	78,47/BB	80,00/BB	79,95/BB

Grafik 11
Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2023
di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Persentase Nilai AKIP OPD
dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Kategori A / Nilai 80,01	Kategori BB / Nilai 79,95	99,92%	Kategori A / Nilai 80,03	99,90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari table di atas, pada tahun 2024 Nilai AKIP OPD dengan target Kategori A/Nilai 80,01, realisasinya yaitu Kategori BB/Nilai 79,95. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kategori A jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai AKIP Inspektorat dengan akhir Renstra Inspektorat belum mencapai target yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar tercapainya peningkatan Nilai AKIP Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Kinerja Per Triwulan dan kedepannya menyusunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperbaiki renaksi yang telah dibuat dengan target kinerja per bulan atau per triwulan berdasarkan perhitungan yang logis.
3. Memastikan semua pegawai menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) Berjenjang, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Renaksi Berjenjang, dan Laporan Kinerja Per Triwulan serta kedepannya memastikan semua pegawai menyusunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan perbaikan pada dokumen RKA sehingga dapat menyajikan data capaian dan hasil dari setiap sub kegiatan, serta kedepannya memastikan semua dokumen perencanaan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan mekanisme monitoring dan evaluasi atas kinerja berjalan secara berkala (minimal triwulan) dan berjenjang, serta jika diperlukan melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan/atau anggaran dan mendokumentasikannya secara memadai (notulen rapat, daftar hadir, foto kegiatan, laporan monev, renaksi, dan lain-lain).
6. Melakukan pengukuran kinerja sampai ke individu staf, yang dibuktikan dengan laporan kinerja masing-masing individu.

7. Menyajikan contoh data kinerja yang dikumpulkan dan olah data pengukuran kinerja.
8. Meningkatkan peran aktif pimpinan dan atasan masing-masing pegawai untuk mendorong semua pegawai mengoptimalkan implementasi SAKIP sehingga dapat terbentuk persamaan persepsi bahwa SAKIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi memerlukan langkah nyata dan kerjasama dari semua level individu untuk mewujudkan perangkat daerah yang lebih akuntabel.

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan yang menjadi mandatory antara lain adalah:

1. Pendampingan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata Kelola Kelola pemerintahan yang baik maka perlu diadakannya reformasi birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2024. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tugas Inspektorat Daerah dalam ini sebagai pengawal terselenggaranya reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan melaksanakan pendampingan reformasi birokrasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan sasarannya menyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Pendampingan Manajemen Risiko

Maturitas (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai level 3 berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) oleh BPKP pada tahun 2024.

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Riau maka perlu dilakukan pendampingan manajemen risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terlaksananya manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko yang terjadi pada program/kegiatan yang dijalankan.

Sasaran strategis juga dapat di lihat dari analisis di bawah ini:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilaksanakan.

Penyebab keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024, komitmen Pimpinan Inspektorat dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat serta komitmen pimpinan yang tinggi dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada unit organisasi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat meningkatkan kinerja semua unit dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Serta didukung dengan anggaran yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian masih diperlukannya APIP yang memiliki kompetensi sehingga pada saat melaksanakan audit mendapatkan hasil yang optimal. Perlunya dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan sangatlah berpengaruh terhadap jalannya pengawasan.

2. Analisis Atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.28
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang 100%)	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	100%	84,96%	15,04%
		Level Kapabilitas APIP	100%	80,14%	19,86%
	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	68,22%	31,78%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	68,22%	31,78%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB	100%	49,60%	50,40%
		Nilai AKIP OPD	100%	49,60%	50,40%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tidak terlepas dari tersediannya anggaran yang di terima. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, bahwa dalam penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi :

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Kinerja rutin: seperti Reviu RPJMD, Reviu RKPD, RKA SKPD, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Kas Opname, Evaluasi SPIP, Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
2. Pengawasan prioritas nasional
3. Pengawasan reformasi birokrasi
4. Penegakan Integritas

b. Kegiatan non pengawasan;

c. Sarana dan prasarana;

d. Reviu DAK Fisik yang bersumber dari dana alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan bagi Inspektorat seharusnya sebesar 0,5% dari total belanja daerah apabila diatas Rp2.000.000.000.000.

Dengan adanya pengalokasian anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berusaha untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan, anggaran yang disediakan sebesar Rp664.444.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp564.528.379,00 (84,96%) dengan tingkat efisiensi 15,04% dan capaian kinerja sebesar 93,02%.
2. Untuk Indikator Level Kapabilitas APIP anggaran yang disediakan sebesar Rp,28.919.446.211,00 dengan serapan anggaran sebesar 23.174.969.861,00 (80,14%) dengan tingkat efisiensi 19,86% dan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti sebesar Rp381.903.932,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp260.544.347,00 (68,22%) dengan tingkat efisiensi 31,78% dan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti sebesar Rp381.903.932,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp260.544.347,00 (68,22%) dengan tingkat efisiensi 31,78% dan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Untuk Indikator Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Predikat Nilai Minimal BB sebesar Rp258.882.144,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp128.413.050,00 (49,60%) dengan tingkat efisiensi 50,40% dan capaian kinerja sebesar 90%.
6. Untuk Indikator Nilai AKIP OPD sebesar Rp258.882.144,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp182.241.056,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp128.413.050,00 (49,60%) dengan tingkat efisiensi 50,40% dan capaian kinerja sebesar 99,92%.

3. Analisis Capaian Program/Kegiatan (Output) Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.29
Realisasi Program Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.934.187.543,39	20.209.887.931	84,44	84,44
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.868.805.886	1.860.168.845	64,84	100
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.116.452.781,61	1.104.913.085	52,20	100
Total Belanja langsung		28.919.446.211	23.174.969.861	80,14	94,81

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.30
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Audit/Jumlah Laporan Hasil Audit				
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	Laporan	300	300	100%

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
b	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR LKjIP OPD	Laporan	30	30	100%
c	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu atas LKPD	Laporan	1	1	100%
d	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen/Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Kesepakatan	1	1	100%
e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	48	48	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
a	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5	5	100%
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
3	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan dibidang Pengawasan				
a	Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan PKPT	Dokumen/ Rekomendasi	1	1	100%

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi					
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	OPD	15	15	100%
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	Jumlah OPD	15	15	100%
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan	Laporan	4	4	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari 3 Program, 11 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan pada tahun 2024 telah mencapai target output 100%, hal ini tidak terlepas dari anggaran pengawasan yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP bisa lebih maksimal. Disamping keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, masih ada program/kegiatan/sub kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dikarenakan ada perubahan penilaian mandiri reformasi birokrasi di tahun 2024, yang mana tidak semua OPD dilakukan pendampingan dan penilaian, namun hanya beberapa OPD yang terkait dengan tematik yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN RB.

Selain itu, hasil yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan belum adanya pemahaman tentang penilaian mandiri reformasi birokrasi tematik dari seluruh OPD yang ada, sehingga diperlukan pendampingan yang komprehensif oleh Evaluator dari Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, untuk tahun 2024 ada beberapa capaian kinerja lain yang di peroleh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP Level 3 sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.09.03/LHP-249/PW04/6/2024, Tanggal 29 Juli 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
2. Maturitas SPIP Level 3 surat sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.09.03/LHP-464/PW04/3/2024, Tanggal 27 Desember 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
3. Peringkat pertama penilaian SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sistem AKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir meraih nilai tertinggi sebesar 79,95 dibandingkan dengan OPD lainnya.

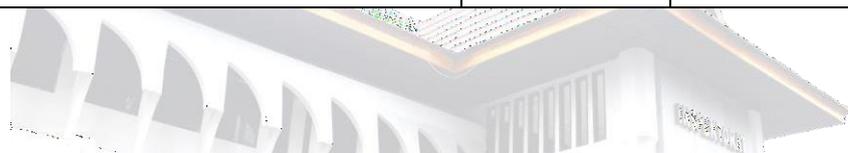
D. REALISASI ANGGARAN

Total belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebesar Rp28.919.446.211,00 dengan realisasi keuangan Rp23.174.969.861,00 atau dengan persentase 80,14%. Dengan rincian belanja Operasi Rp24.564.131.502,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp19.354.934.861,00 atau dengan persentase 78,79%. Sedangkan untuk belanja Modal Rp4.355.314.709,00 dan realisasi keuangan Rp3.820.035.000,00 atau dengan persentase 87,71%. Dengan demikian dapat diartikan hampir semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.31
Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
I.	Total Belanja	28.919.446.211	Rp23.174.969.861	80,14	95,62
A.	Belanja Operasi, terdiri dari:	24.564.131.502	19.354.934.861	78,79	91,23
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475.652.212,42	213.750.575	44,94	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.951.252,56	37.793.225	34,06	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.591.840,81	0	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.226.975,05	47.544.300	64,93	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.882.144	128.413.050	49,41	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.937.691.315	12.513.514.552	89,78	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.919.446.211	12.509.641.317	89,87	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.122.552	0	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.122.552	3.873.235	42,46	100
3	Administrasi Kepegawaian	2.082.608.880	1.100.989.379	52,87	82,46
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	233.760.000	222.555.000	95,20	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.039.880	0	0	100

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	664.444.000	564.528.379	84,96	93,02
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.169.365.000	313.906.000	36,84	36,84
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.491.249.034,97	1.411.458.159	94,65	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.315.669	108.486.979	92,47	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.799.244	193.379.586	99,78	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.446.067,97	50.017.966	75,28	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	191.316.000	190.543.500	99,59	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	235.687.054	235.249.000	99,81	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.685.000	633.781.128	92,29	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.631.392	404.921.975	87,34	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.800.192	171.719.775	92,92	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.711.200	220.082.200	82,82	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.040.000	745.218.291	66,06	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.120.000	103.756.552	63,99	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.600.000	282.618.066	69,68	100
	Pemeliharaan Mebel	17.760.000	17.652.000	99,39	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.980.000	142.248.300	86,22	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.580.000	198.943.373	52,69	100
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.257.867.524	1.721.367.645	76,24	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.702.059.734	1.143.518.648	67,18	100
	Reviu Laporan Kinerja	80.603.757	79.865.500	99,08	100



	Reviu Laporan Keuangan	55.518.792	55.190.200	99,41	100
	Kerja Sama Pengawasan Internal	337.781.309	182.248.950	53,95	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	381.903.932	260.544.347	68,22	100
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	310.938.362	138.801.200	44,64	100
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	310.938.362	138.801.200	44,64	100
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	404.739.704,70	217.329.300	53,69	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	404.739.704,70	217.329.300	53,69	100
10.	Pendampingan dan Asistensi	1.711.713.076,91	887.583.785	51,85	100
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	746.385.747,80	269.498.100	36,11	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	266.172.203,89	191.441.550	71,92	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	699.155.125,22	426.644.135	61,02	100
B.	Belanja Modal	4.355.314.709	3.820.035.000	87,71	100
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.355.314.709	3.820.035.000	87,71	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.336.676.000	2.839.495.000	85,09	100
	Pengadaan Mebel	194.000.000	192.150.000	99,05	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	824.638.709	788.390.000	95,60	100

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat dilakukan karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di Tingkat pusat dengan data yang belum memadai.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Inspektorat Daerah. LKjIP ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu tahun 2024 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 telah berhasil dengan baik. Hasil Capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penetapan target tahun 2024, dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 3 IKU yang sesuai/melebihi target dan 3 IKU yang belum mencapai target.
2. IKU yang sesuai/melebihi target adalah: Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan; Level Kapabilitas APiP; Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APiP daerah yang SELESAI ditindaklanjuti; Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti, sementara IKU yang belum mencapai target yaitu Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB; Nilai AKIP Inspektorat.

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 secara keseluruhan telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan;
2. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Inspektorat yang terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan yang harus dilakukan berupa pemeriksaan, evaluasi, reuiu, asistensi dan pendampingan.
3. Kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan masih rendah.
4. Kompetensi SDM APIP yang belum optimal dan berkualitas.

Guna pencapaian sasaran tersebut diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Melaksanakan evaluasi kompetensi pejabat fungsional auditor dan P2UPD (melakukan assessment).
3. Melakukan pembinaan pada organisasi perangkat daerah melalui asistensi dan pendampingan.
4. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan.
5. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor dan P2UPD untuk mengikuti diklat substantif audit.
6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan-kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Untuk memperbaiki tata kelola/proses bisnis dalam akuntabilitas kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan langkah-langkah perubahan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi tahun sebelumnya dan perubahan dalam budaya kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

1. Telah dibuat rencana aksi perbaikan sistem pengendalian intern;
2. Telah menyusun laporan bulanan terkait capaian kinerja masing masing bidang/sub bidang;
3. Telah menyusun laporan monitoring kinerja secara periodik;
4. Telah melakukan evaluasi program/kegiatan dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja;
5. Telah dibuat rencana tindaklanjut pengendalian atas identifikasi risiko-risiko yang dibuat berikut mitigasi risiko;
6. Seluruh proses bisnis di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dimasukan ke dalam web Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian LKjIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG, S.IP, M.Si
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI ROKAN HILIR,



AFRIZAL SINTONG, S.IP, M.Si

PIHAK PERTAMA,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750413 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawas dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Level Kapabilitas APIP	91% Level 3
2	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	71% 80%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat Nilai Minimal BB Predikat Nilai AKIP OPD	91% A

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18,886,483,724	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,128,229,302	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,971,861,097	APBD

Bagansiapiapi, 29 Januari 2024



BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG, S.IP, M.Si



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG, S.IP, M.Si
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 29 November 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI ROKAN HILIR,



AFRIZAL SINTONG, S.IP, M.Si

PIHAK PERTAMA,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawas dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Level / Skor Kapabilitas APIP	91% Level 3/3,1
2	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	71% 80%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat Nilai Minimal BB Predikat AKIP OPD	91% Predikat A / Nilai 80

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	23,934,187,543,39	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,868,805,886	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2,116,452,781,61	APBD

Bagansiapi, 29 November 2024



BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG, S.IP, M.Si



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

**H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750413 199503 1 002**

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO.	Rekomendasi LHE INSPEKTORAT TAHUN 2024	Rencana Aksi	Target	Waktu	Penanggung Jawab	Status / Progres	Kondisi Terkini	BUKTI TL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mendeskripsikan analisa kegagalan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu di sub kegiatan pengawasan secara khusus dengan uraian penjelasan secara eksplisit	Memperbaiki LKJIP Inspektorat Daerah yang telah di reviu sesuai Rekomendasi	1 Laporan	Juni 2024	Perencana Ahli Muda	Selesai	Selesai	LKJIP Setelah di Reviu Oleh APIP
2.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di Aplikasi SELENTA Kabupaten Rokan Hilir	1 Laporan	Juni 2024	Perencana Ahli Muda	Selesai	Selesai	SS APLIKASI SELENTA

Bagansiapiapi, 28 Juni 2024



INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750413 199503 1 002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024
TRIWULAN 4**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	REALISASI TARGET KINERJA SASARAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
		TW1	TW2	TW3	TW4					TW1	TW2	TW3	TW4			
1	2	3				4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	-	-	-	91%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	90%	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai dengan target peserta yang dianggarkan	664.450.000	Inspektur
	Level / Skor Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 3 / 3,1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang melakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Level 3 / 3,260	Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3	894.764.858	Inspektur
Meningkatnya Kineja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	-	-	-	71%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	-	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	361.473.252	Inspektur
	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	-	-	-	81,50%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	-	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	361.473.252	Inspektur
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai BB	-	91%	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	90%	-	-	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Melaksanakan Monev Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Per Triwulan	323.220.626	IRBAN
	Predikat AKIP OPD	-	Kategori A/Nilai 80,01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kategori BB/Nilai79,95	-	-	Melaksanakan penyusunan dokumen Renstra dan Renja serta berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait	323.220.626	Perencana Ahli Muda
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Menyusun LKJIP,LPPD, dan LKPJ Inspektorat	60.374.605	Perencana Ahli Muda	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Melaksanakan Monev Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Per Triwulan	375.632.663	Perencana Ahli Muda	

Bagansiapiapi, 31 Desember 2024



INSPEKTUR DAERAH,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si
NIP. 19750413 199503 1 002